

## **BAB II**

### **DI EROPA TAHUN 2015**

Krisis pengungsi diawali dengan kedatangan para pengungsi melewati jalur Mediterania dan Balkan, fenomena tersebut mengakibatkan lonjakan pengungsi di wilayah negara-negara Eropa. Peningkatan terus terjadi disebabkan oleh ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari konflik yang sedang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti : Suriah, Irak, dan Afghanistan. Bab ini menjelaskan mengenai kekacauan dan kondisi yang terjadi akibat adanya lonjakan pengungsi, respons dari organisasi regional Uni Eropa, serta membahas mengenai organisasi kemanusiaan ICRC yang terlibat dalam menanggulangi krisis pengungsi di Uni Eropa pada tahun 2015.

#### **2.1 Krisis Pengungsi dan Kekacauan yang Terjadi**

Krisis atau dapat dikatakan sebagai kemelut pada suatu peristiwa merupakan kejadian yang mendorong terjadinya kekacauan pada tahun 2015 di berbagai negara anggota Uni Eropa. Pada pertengahan tahun 2015, sebanyak 230.000 orang memasuki Uni Eropa melalui wilayah Italia dan Yunani (Clayton & Hareward, 2015), yang mana dari kedua negara tersebut para pengungsi akan menentukan negara destinasi yang akan dituju. Sebagian besar dari pengungsi memilih negara-negara di Eropa Barat dan Utara. Salah satu negara yang memfasilitasi para pada awal kedatangan para pengungsi adalah Hungaria, negara tersebut pun mencegah para pengungsi untuk mendatangi negara-negara Uni Eropa yang lainnya.

Pada saat yang sama, Perdana Menteri Republik Hungaria, Viktor Orban memperlihatkan kekhawatirannya akan kedatangan para pengungsi yang diindikasikan dapat memperkeruh isu kampanye politik di Hungaria. Orban menyatakan penolakan kerasnya untuk menerima para pengungsi di Hungaria (Dempsey, 2015). Sementara itu disisi lain, Hungaria telah menampung sebanyak 150.000 pengungsi (*Austria defends border checks amid migration crisis*, 2015) pada bulan Agustus tahun 2015. Keadaan kamp (tempat tinggal) para pengungsi sangat tidak kondusif. Kebersihan dan penyediaan tempat yang tidak layak huni disebabkan oleh sikap tidak ramah Pemerintah Hungaria, hal ini mengakibatkan prospek kecil para pengungsi untuk menjadikan Hungaria tempat mereka melanjutkan hidup selanjutnya.

### **2.1.2 Kekalutan dan Resistansi Beberapa Negara Uni Eropa saat Terjadinya Krisis Pengungsi**

Pada bulan September 2015, Kantor Federal Jerman untuk Migrasi dan Pengungsi, mendapati lonjakan pengungsi yang cukup besar. Kejadian ini akibat dari penolakan negara-negara Uni Eropa yang telah menolak pemberian suaka kepada para pengungsi. Pemerintah Jerman kerumitan dan kewalahan pada saat yang bersamaan, mereka tidak bisa menyaring pengungsi yang sebenarnya sudah mendapatkan suaka atau belum dari negara Uni Eropa lainnya.

Saat itu keadaan cukup kacau, namun Jerman tetap mengabdikan suaka bahkan dari mereka yang sebelumnya sudah berstatus pengungsi di negara Uni Eropa lainnya. Hingga akhirnya, Jerman bersikap dan melakukan deportasi kepada para pengungsi ke

negara awal dimana mereka telah klaim suaka sebelumnya (*Bundeszentrale für politische Bildung in German*, 2019).

Melihat dari sikap tersebut, dapat ditafsirkan bahwa Jerman akan mulai menerima pengungsi dalam jumlah yang besar karena telah melakukan filterisasi bagi para pengungsi yang sebelumnya sudah berdatangan ke Jerman. Sepuluh hari setelah memutuskan untuk menerima pengungsi dari Hungaria. Negara Jerman memberlakukan 3olemic pembatasan agar lebih teratur (Deutsche Welle, 2015). Selain itu juga Jerman bekerja sama dengan Austria dalam pemberian suaka. Kedua negara tersebut memperbolehkan pemberian suaka dilakukan di Austria, hal ini agar lonjakan pengungsi tidak terjadi terlalu besar di Jerman.

Austria menerima beberapa pencari suaka untuk menjadi tempat singgah dengan menyediakan tempat tinggal, makananan dan perawatan kesehatan. Hal ini dilakukan agar memperlambat mobilitas para pengungsi ke Jerman (Hannoversche Allgemeine, 2021). Setelah beberapa saat, Austria menerima hingga 10.000 migran tujuan Jerman yang tiba dari Slovenia dan Hungaria (Sewell & Palko, 2015). Pada bulan November 2015, Slovenia mendirikan pembatas sementara di sepanjang perbatasan untuk membuat para pengungsi yang mellintas segera menuju penyeberangan perbatasan. Beberapa negara, seperti Hungaria, Slovenia, dan Austria segera mengamankan perbatasan dengan meminta para tentara untuk mengusir para pengungsi.

Dampak dari perbatasan Jerman yaitu adanya efek domino di negara-negara tenggara Jerman, hal ini terlihat dari negara Austria dan Slovakia yang secara beruntun

memberlakukan 4olemic perbatasan di wilayah mereka masing-masing (Eddy, 2015). Sikap rekstruktif dari Hungaria yaitu dengan menutup perbatasannya dengan Serbia selama beberapa bulan dan mengalihkan jalur para pengungsi agar melewati Kroasia dan Slovenia.

Sementara yang terjadi pada sikap Kroasia adalah mengeluarkan kekuatan militer untuk mendorong kembali para pengungsi agar kembali lagi ke Hungaria. Perselisihan antar pemimpin negara pun terjadi karena saling menyalahkan atas situasi tersebut dan saling berdebat terhadap solusi bagi puluhan ribu pengungsi yang sedang terdampak. Tak lama dari kekacauan tersebut, Kroasia pun menutup perbatasannya dengan Serbia dengan tujuan untuk melepas status sebagai negara transit. Sedangkan pada negara Slovenia masih memperlihatkan sikap positifnya dengan tetap membuka perbatasannya bagi para pengungsi (BBC News, 2015).

## **2.2 Respons Uni Eropa sebagai Organisasi Regional Terhadap Krisis yang Terjadi**

### **2.2.1 Latar Belakang dan Peran Uni Eropa dalam Politik Global**

Uni Eropa berawal dari keinginan untuk membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah Eropa setelah Perang Dunia II. Diawali dengan adanya pandangan bahwa kerjasama antar negara adalah kunci untuk mencegah terjadinya perang di masa depan. Uni Eropa (disingkat UE) merupakan suatu organisasi supranasional dan antarpemerintahan yang didirikan melalui pembentukan European Economic Community pada tahun 1957.

Lalu, pada tanggal 1 Januari 1958 resmi mengubah komunitas tersebut sebagai masyarakat Eropa yang merupakan pilar perdana dari organisasi regional Uni Eropa (Bomberg, Paterson, & Corbett, 2012). Organisasi tersebut telah bertransformasi dari sebuah badan perdangan menjadi sebuah kerja sama ekonomi dan politik. Saat ini, Uni Eropa beranggotakan 27 negara, peneliti menyertakan Political Maps of Europe agar mempermudah pembaca dalam melihat negara-negara anggota Uni Eropa

Gambar 2.1  
**Political Maps of Europe**



Sumber : (*Nation Online*, 2020)

Visi dari pembentukannya Uni Eropa tentu untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di seluruh benua dengan adanya keterhubungan antar negara-negara Eropa dalam suatu komunitas yang lebih besar. Dengan adanya Uni Eropa, harapannya dapat menghilangkan perbatasan ekonomi dan politik antar negara

anggota sehingga memperkuat kerjasama di berbagai bidang termasuk keamanan dan perdagangan. Eksistensi Uni Eropa dilatar belakangi oleh Traktat Maastricht yang diratifikasi pada tahun 1992. Isinya terkait dengan komponen yang ada pada organisasi seperti memiliki institusi yang mandiri seperti adanya Komisi Eropa, Parlemen Eropa, Dan Dewan Uni Eropa.

Keberadaannya di lingkup global tentu memberi pengaruh yang cukup besar, terutama dalam hal perdangan, 6olemic666, dan keamanan. Menurut buku karya Daniel Kenealy, John Peterson, dan Richard Corbett yang berjudul "*The European Union : How Does it Work?*" Uni Eropa memiliki peran penting dalam politik dunia karena beberapa alasan berikut, yaitu :

1. Kekuatan ekonomi: Uni Eropa merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan anggota-anggotanya yang menghasilkan lebih dari 16 triliun 6olemi AS pada tahun 2020. Hal ini membuat Uni Eropa menjadi kekuatan besar dalam perdagangan internasional dan memberikan pengaruh dalam regulasi ekonomi global.
2. Diplomasi: Uni Eropa memainkan peran penting dalam diplomasi internasional, baik dalam membantu penyelesaian konflik maupun mempromosikan perdamaian dan kerja sama internasional. Uni Eropa juga merupakan aktor kunci dalam berbagai isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, migrasi, dan hak asasi manusia.
3. Kontribusi terhadap keamanan global: Uni Eropa memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap keamanan global. Selain sebagai kekuatan ekonomi,

Uni Eropa juga memiliki kemampuan militer dan menjadi salah satu 7olemic777r terbesar dalam operasi perdamaian PBB di seluruh dunia.

4. Konsensus: Uni Eropa menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan negosiasi dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif ini memungkinkan Uni Eropa untuk mengambil keputusan yang lebih kuat dalam isu-isu global.

Dengan memiliki faktor-faktor tersebut, Uni Eropa mampu menjadikan dirinya sebagai aktor penting dalam politik dunia dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai isu global.

Kembali membahas mengenai krisis pengungsi yang terjadi pada Uni Eropa, tentu apa yang dilakukan oleh para pengungsi yang berdatangan adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Namun, pada realitanya sikap berbagai negara anggota dalam penutupan perbatasan mendorong terjadinya krisis. Hal tersebut tentu memberi kecemasan kepada para pejabat Uni Eropa. Mereka mengatakan bahwa sikap restruktif negara-negara yang menolak pengungsi telah merusak rasa percaya dan *freedom of movement*<sup>1</sup> yang merupakan nilai yang dipegang para anggota Uni Eropa. Sejak tahun 1985, Uni Eropa memberlakukan *Visa Schengen* sebagai implementasi dari nilai *free of movement* di wilayah Uni Eropa.

---

<sup>1</sup> Freedom of Movement atau diartikan sebagai “**Kebebasan bergerak, kebebasan mobilitas, atau hak untuk perjalanan**” adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan hak asasi manusia untuk melakukan pergerakan dari tempat ke tempat lainnya dalam suatu wilayah negara (Gillbert, 2014)

Kebijakan tersebut berdampak positif bagi masyarakat Eropa karena tentu mempermudah mobilitas karena tidak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang di setiap perbatasan antar Negara Eropa (*The International Economy*, 2015). Namun, saat terjadinya kekacauan pada tahun 2015 yang disebabkan oleh para pengungsi, tentu berimbas pada keberjalanan serta efektivitas kebijakan terkait *Visa Schengen* yang justru menjadi ancaman bagi negara-negara Uni Eropa. Para pengungsi mempunyai kebebasan untuk melintasi negara-negara Uni Eropa sehingga mengganggu stabilitas keamanan negara anggota. Melihat berbagai kekacauan yang terjadi, Uni Eropa mengkonstruksi kebijakan *Common European Asylum System (CEAS)* agar dapat meningkatkan empati dan solidaritas negara-negara anggota terkait permasalahan pengungsi.

### **2.2.1 Kebijakan Common European Asylum System (CEAS) sebagai Hasil Inisiasi Uni Eropa dan Polemik yang Terjadi**

Eksistensi negara-negara Uni Eropa dalam dunia internasional tentu diharapkan dapat memberi kontribusi kepada permasalahan-permasalahan yang ada. Khususnya dalam permasalahan kemanusiaan yang kian meningkat, oleh sebab itu, negara anggota mempunyai tanggung jawab untuk membantu para pengungsi dengan cara yang tidak melepas nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pemberian suaka. Organisasi Uni Eropa perlu memastikan bahwa dalam mengabdikan permintaan suaka negara-negara anggota berjalan dengan efektif dan tidak disalahgunakan.

Dengan tanggung jawab tersebut, Uni Eropa sudah mengkonstruksi CEAS sejak 1999, kebijakan ini merupakan hasil pengembangan dari hasil ratifikasi Konvensi Jenewa pada tahun 1951 (*European Commission*, n.d.). Implementasi kebijakan migrasi di Eropa dinilai cukup efektif karena dapat meningkatkan solidaritas negara-negara Uni Eropa. Selanjutnya, Uni Eropa membuat suatu kebijakan terkait persoalan imigrasi.

Pembuatan Kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) merupakan tanggapan dari adanya krisis pengungsi di Eropa, yang berisi 5 poin sebagai berikut :

- a. *Asylum Procedure Directive* adalah peraturan Uni Eropa yang berkaitan dengan memberikan standar minimum terhadap peraturan pengajuan suaka di seluruh negara anggota Uni Eropa. Dengan adanya prosedur ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa seluruh pengungsi menerima perlakuan yang sama dan adil di seluruh Uni Eropa.
- b. *Reception Condition Directive* adalah peraturan Uni Eropa yang menentukan standar minimum terkait kondisi penerimaan bagi pengungsi di seluruh Uni Eropa. Seluruh negara anggota dianjurkan untuk dapat memberikan fasilitas yang memadai terkait dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, dan fasilitas yang layak untuk dihuni para pengungsi.
- c. *Qualification Directive* merupakan peraturan Uni Eropa yang berkaitan dengan penentuan status pengungsi atau status perlindungan lainnya yang akan diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan suaka. Dengan adanya prosedur ini, pengungsi akan lebih terjamin dikarenakan sudah seharusnya

negara anggota Uni Eropa memberikan perlindungan secara konsisten dan merata.

*d. Dublin Regulation* yaitu prosedur untuk menentukan negara yang akan diberikan tanggung jawab dalam memberikan suaka kepada para pengungsi. Dengan tujuan untuk mencegah pengajuan berganda dari para pengungsi dan memastikan bahwa pengungsi diarahkan kepada negara yang paling dekat dengan posisi pengajuan permohonan. Namun, Dublin regulation telah menuai banyak kontroversi karena dianggap membuat situasi para pencari suaka dan negara pemberi suaka dikarenakan tidak menyesuaikan dengan standar yang dimiliki oleh berbagai negara anggota yang berbeda-beda.

*e. Eurodac Regulation* adalah peraturan terkait pengumpulan dan pemrosesan sidik jari pencari suaka dan pengungsi di Uni Eropa. Dengan adanya pengaturan ini akan memudahkan negara mendeteksi para pengungsi yang sudah mendapatkan suaka serta mengetahui negara yang bertanggung jawab atasnya. Meskipun pada keberjalanannya. Eurodac Regulation merupakan bagian dari kerangka hukum Uni Eropa, namun Eurodac Regulation telah menuai banyak kritik karena dianggap telah melampaui masalah privasi dan Hak Asasi Manusia para pencari suaka.

Kebijakan CEAS diharapkan dapat mengarahkan negara-negara Uni Eropa untuk menyelesaikan lonjakan pengungsi yang sudah atau polemik kedepannya. Pelaksanaannya disetiap berbagai negara anggota tentu bergantung terhadap keputusan

dan tanggapan negara-negara Uni Eropa. Sebagai contoh, Jerman menghasilkan kebijakan *Open Door Policy* sebagai solusi untuk lonjakan pengungsi yang berdatangan ke wilayahnya. Saat CEAS diimplementasikan pada saat krisis pengungsi, ada berbagai 11 olemic yang terjadi antar negara anggota Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dan pembagian beban pengungsi antara negara-negara anggota Uni Eropa. Beberapa negara seperti Polandia, Hungaria, dan Ceko memberikan penolakannya terhadap jumlah pengungsi yang besar. Sementara negara seperti Jerman dan Swedia, cenderung memberikan dukungannya untuk jumlah pengungsi yang besar.

Pada tahun 2016, Uni Eropa mencapai kesepakatan terkait pembagian beban pengungsi yang menimbulkan berbagai perdebatan kembali, dikarenakan adanya ketidakpuasan yang serupa dengan perbedaan pandangan terhadap beban pengungsi sejak awal. Jumlah pengungsi tersebut disepakati ke dalam suatu kebijakan yang dinamakan *forced relocation* (relokasi paksa) berjumlah sebanyak 160.000 pengungsi dalam waktu dua tahun (Karagoergiou & Noll, 2022).

Dengan adanya 11 olemic tersebut tentu memunculkan permasalahan lain dalam penerapan CEAS, yaitu seperti ketidakmerataan dalam pembagian beban, mengurangi solidaritas negara-negara anggota Uni Eropa, dan adanya tantangan hukum dari salah satu isi dari CEAS yaitu *Dublin Regulation* yang berkaitan dengan penentu negara yang bertanggung jawab atas pemberian suaka. Kekurangan tersebut terlihat dari ketidakmampuan negara-negara Uni Eropa untuk memberikan perlindungan yang layak bagi para pengungsi (Karageorgiou & Noll, 2022, p. 142). Dalam menerapkan

kebijakan, tentu setiap negara anggota memiliki respons yang beragam. Peneliti mengambil lima negara sebagai representasi dari keberagaman tanggapan negara-negara anggota Uni Eropa. Agar mempermudah pembaca, peneliti mengelaborasikannya kedalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Respon Berbagai Negara Anggota Uni Eropa terkait Kebijakan CEAS

No.	Negara Anggota	Respons terkait Kebijakan
1.	Jerman	Jerman memberikan respons yang sangat positif terkait penerimaan pengungsi, dimana pada saat krisis terjadi, Jerman menunjukkan sikap yang proaktif dan menghasilkan kebijakan “ <i>Open Door Policy</i> ” sebagai kesempatan untuk para pengungsi masuk ke negara tersebut tanpa batasan tertentu. Pada implementasinya, tentu menuai banyak kontroversi dari berbagai negara karena sikap Jerman tersebut karena dianggap cukup restruktif dan tidak menyelesaikan krisis yang ada. Pada kelanjutannya, Jerman akhirnya bekerjasama dengan negara Uni Eropa Lainnya untuk memperkuat pengawasan perbatasan Uni Eropa agar menimalisir berbagai ancaman dari adanya krisis yang terjadi.
2.	Italia	Italia merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi pengungsi paling banyak untuk mencari perlindungan di Uni Eropa. Pada awalnya, Italia memberikan sikap yang positif terhadap para pengungsi dan menginisiasikan sebuah program pencarian para pengungsi yang hilang di Laut tengah, yang dinamakan kebijakan <i>Operasi Mare Nostrum</i> . Tetapi, pada keberjalanannya Italia tidak mendapatkan respon yang baik dari berbagai negara Uni Eropa, mereka tidak menerima pengungsi yang telah diselamatkan oleh Italia. Setelah ketidakberjalanannya tersebut, Italia akhirnya menekan Uni Eropa untuk memperkuat kebijakan CEAS.
3.	Yunani	Yunani merupakan negara yang paling banyak didatangi oleh pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang mencari suaka di negara-negara Uni Eropa. Awalnya, Yunani kesulitan dalam menghadapi krisis pengungsi yang terlalu besar dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Yunani dalam mengatasi para pengungsi. Pada keberjalanannya, Yunani mendapatkan bantuan dana dan personel dari Uni Eropa untuk menghadapi pengungsi yang terjadi
4.	Prancis	Pada awalnya Prancis memperlihatkan sikap yang pasif dan cenderung menolak untuk menerima jumlah pengungsi yang ditentukan oleh Uni Eropa. Namun, setelah adanya serangan teroris di Paris pada tahun 2015 yang tersangkanya merupakan beberapa pengungsi, pemerintah Paris mulai memberikan kontribusinya melalui kerja sama dengan negara-negara lain dalam menangani krisis pengungsi di Uni Eropa.

5.	Hungaria	Hungaria merupakan salah satu negara yang paling menolak kebijakan CEAS. Pada saat terjadinya krisis pengungsi, Hungaria memberikan penolakannya melalui kebijakan tentang pengawasan terhadap perbatasan yang dilalui oleh para pengungsi. Sikap tersebut tentu menuai kritik dari Uni Eropa
----	----------	---

Diolah kembali dari (Pew Research Centre, 2016), (Amnesty International, 2014), (European Commission, 2021) (Asylum Information Database, 2021), dan (BBC News, 2015)

Meskipun pada keberjalanannya menghadapi berbagai permasalahan dan kontroversi, perlu disadari bahwa pembuatan CEAS dilakukan dikeadaan mendesak dan darurat, sehingga kedepannya memerlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Uni Eropa. Kerja sama dapat dilakukan tentu dapat mudah dilakukan jika Uni Eropa memberikan kesempatan untuk pihak-pihak diluar Uni Eropa dan anggotanya untuk memberikan kontribusinya dalam penyelesaian krisis pengungsi tersebut. Pada realitanya, Uni Eropa menunjukkan hal yang demikian, mereka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan kemanusiaan seperti ICRC, UNHRC, PBB, dan sebagainya.

## **2.3 ICRC sebagai Organisasi Kemanusiaan Internasional**

### **2.3.1 Asal-Usul dan Tugas ICRC**

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan pada tahun 1863 di Jenewa, Swiss. Tujuannya adalah memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. ICRC berusaha untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan

martabat dasar individu yang terkena dampak konflik dihormati dan dipenuhi. ICRC berkantor pusat di kota Jenewa, Swiss dan memiliki kantor-kantor di luar negeri yang disebut Delegasi di sekitar 80 negara.

Setiap delegasi berada di bawah tanggung jawab seorang Kepala delegasi yang adalah perwakilan resmi ICRC di suatu negara. Dari 2.000 karyawan profesionalnya, sekitar 800 orang bekerja di kantor pusat Jenewa dan 1.200 ekspatriat bekerja di lapangan. Setengah dari pekerja lapangan bertugas sebagai delegasi (*delegate*) yang mengatur operasi ICRC di negara-negara berbeda sedangkan separuh lainnya adalah tenaga spesialis seperti dokter, agronomis, insinyur atau penterjemah. Di kantor delegasi, staf internasional dibantu oleh sekitar 13.000 staf nasional, sehingga jumlah total staf yang bekerja untuk ICRC sekitar 15.000 orang.

### **Gambar 2.2**

*Logo International Committee of The Red Cross*



# ICRC

Sumber: (ICRC, n.d.)

Delegasi juga sering bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah dimana delegasi berada sehingga bisa memanfaatkan relawan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional untuk membantu sebagian operasi

ICRC. Organisasi ICRC menyediakan berbagai layanan, termasuk perawatan medis, dukungan bagi keluarga orang yang hilang, layanan air dan sanitasi, serta bantuan dalam reunifikasi keluarga yang terpisah akibat konflik.

ICRC telah beroperasi di lebih dari 80 negara di seluruh dunia, bekerja sama dengan masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah nasional dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. ICRC kerap melakukan advokasi untuk pengembangan dan penerapan hukum kemanusiaan internasional serta mempromosikan penghormatan terhadap hukum ini oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. ICRC adalah organisasi independen dan netral yang tidak terafiliasi dengan pihak politik atau agama manapun, dan bekerja secara mandiri dan bersama-sama dengan berbagai pihak dalam upayanya membantu korban konflik di seluruh dunia.

Pernyataan misi resmi ICRC berbunyi: *International Committee of the Red Cross* (ICRC) adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. Tugas utama ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa dan Statuta Gerakan, di mana dikatakan bahwa tugas ICRC antara lain:

- a. memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa;
- b. mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang;

- c. mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang (*Prisoners of War – POW*) dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan;
- d. membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata (layanan pencarian);
- e. mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil; dan,
- f. bertindak sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang.

ICRC berkantor pusat di kota Jenewa, Swiss dan memiliki kantor-kantor di luar negeri yang disebut Delegasi di sekitar 80 negara. Setiap delegasi berada di bawah tanggung jawab seorang Kepala delegasi yang adalah perwakilan resmi ICRC di suatu negara. Dari 2.000 karyawan profesionalnya, sekitar 800 orang bekerja di kantor pusat Jenewa dan 1.200 ekspatriat bekerja di lapangan. Setengah dari pekerja lapangan bertugas sebagai delegasi (*delegate*) yang mengatur operasi ICRC di negara-negara berbeda sedangkan separuh lainnya adalah tenaga spesialis seperti dokter, agronomis, insinyur atau penterjemah. Di kantor delegasi, staf internasional dibantu oleh sekitar 13.000 staf nasional, sehingga jumlah total staf yang bekerja untuk ICRC sekitar 15.000 orang. Delegasi juga sering bekerja sama dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah/Bulan Sabit Merah, dimana, delegasi berada sehingga bisa memanfaatkan relawan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Nasional untuk membantu sebagian operasi ICRC.

Struktur organisasi ICRC sulit dipahami oleh orang luar. Hal ini sebagian karena kerahasiaan organisasi, tetapi juga karena strukturnya yang berubah-ubah. Majelis (*Assembly*) dan Presiden (*Presidency*) adalah dua institusi yang telah lama ada, sedangkan Dewan Majelis (*Assembly Council*) dan Direktorat (*Directorate*) baru dibentuk pada paruh kedua abad kedua puluh. Keputusan sering kali dibuat secara kolektif, sehingga kewenangan dan hubungan kekuasaan tidak kaku. Saat ini, organ terpenting adalah *Directorate* dan *Assembly*.

### 2.3.2 Kontribusi ICRC pada Isu-Isu Kemanusiaan 7

---

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* adalah organisasi kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi korban konflik bersenjata dan situasi darurat lainnya di seluruh dunia. Saat memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada korban konflik bersenjata, termasuk membantu mereka untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan perawatan medis. ICRC juga membantu dalam pemulangan keluarga yang terpisah akibat konflik.

Selain itu, ICRC bekerja untuk melindungi korban konflik bersenjata, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang yang terluka atau sakit. ICRC juga bekerja untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dihormati dan diterapkan di medan perang. Membantu Orang Terdampak Bencana Alam: ICRC memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada orang yang terdampak bencana

alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau kebakaran hutan. ICRC juga membantu mereka untuk mendapatkan air bersih, makanan, dan perlengkapan medis yang diperlukan.

Sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC berusaha untuk dapat memfasilitasi akses kemanusiaan bagi orang yang membutuhkan, termasuk akses ke tempat perlindungan, bantuan kemanusiaan, dan perawatan medis. Selain memberikan wadah untuk berdialog antara pihak yang bertikai untuk mengurangi kekerasan dan menghasilkan solusi untuk berdamai. Secara keseluruhan, ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang sangat penting dalam menangani krisis kemanusiaan di seluruh dunia.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, ICRC berusaha untuk membantu korban konflik bersenjata dan situasi darurat lainnya untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Selama 10 tahun terakhir, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* telah memberikan banyak kontribusi penting dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan di seluruh dunia.

Berikut adalah beberapa kontribusi ICRC dalam krisis kemanusiaan selama 10 tahun terakhir (ICRC, n.d.) :

1. Respons terhadap Krisis Migran dan Pengungsi: ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada jutaan migran dan pengungsi di seluruh dunia. ICRC juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa hak-hak migran dan pengungsi dihormati dan dilindungi.

2. **Tanggapan Terhadap Konflik Bersenjata:** ICRC telah memberikan bantuan medis dan perlindungan kepada korban konflik bersenjata di berbagai negara, termasuk di Suriah, Irak, Yaman, dan lainnya. ICRC juga telah bekerja untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak yang bertikai untuk mengurangi kekerasan dan mendorong solusi damai.
3. **Respons Terhadap Bencana Alam:** ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada orang yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau kebakaran hutan di berbagai negara, termasuk di Nepal, Filipina, dan Indonesia.
4. **Perlindungan Korban :** ICRC telah bekerja untuk melindungi korban konflik bersenjata, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang yang terluka atau sakit. ICRC juga telah bekerja untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dihormati dan diterapkan di medan perang.
5. **Bantuan Kemanusiaan dalam Konflik Non-Internasional:** ICRC telah memberikan bantuan kemanusiaan dan medis kepada korban konflik non-internasional, termasuk dalam konflik di Kamerun, Mozambik, dan Sudan Selatan.
6. **Penyediaan Akses Kemanusiaan:** ICRC telah bekerja untuk memfasilitasi akses kemanusiaan bagi orang yang membutuhkan, termasuk akses ke tempat perlindungan, bantuan kemanusiaan, dan perawatan medis.

Secara keseluruhan, ICRC telah memberikan kontribusi penting dalam menangani berbagai krisis kemanusiaan selama 10 tahun terakhir. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kerja sama dengan berbagai pihak, ICRC terus berusaha untuk membantu korban konflik bersenjata dan situasi darurat lainnya untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan.